



Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* Terhadap Perilaku *Tax Avoidance* Perusahaan *Go Public* di Indonesia

Fadhila Purendka^{1*}, Liza Alvia², Mega Metalia³, Neny Desriani⁴

¹⁻⁴ Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

Korespondensi penulis: purendkadhila@gmail.com

Abstract : This research aims to determine the effect of the level of website-based disclosure of company information on corporate tax avoidance behavior. The objects in this research are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period June 2024. Data collection in this research uses content analysis methods and data processing using the SPSS application. The sampling technique in this research used purposive sampling with a final sample size of 399 companies. The research results show that the level of website-based disclosure of company information has a negative and significant effect on tax avoidance behavior in public companies in Indonesia.

Keywords: *website, tax, avoidance, content, analysis.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan. Objek dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Juni 2024. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten dan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan total sampel akhir sebanyak 399 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan *go public* di Indonesia.

Kata kunci: *website, tax, avoidance, analisis, konten.*

1. LATAR BELAKANG

Dilansir dari *website* Kominfo, yang didasarkan pada hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 221,5 juta jiwa penduduk Indonesia dari jumlah populasi 278,6 juta jiwa terhubung dengan internet. Tingkat penggunaan internet yang tinggi ini tidak terlepas dari kemudahannya, biaya yang rendah, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, cepat dan sangat interaktif (Sadalia et al., 2017). Karena keunggulan tersebut, OJK-RI merespon dengan mengeluarkan POJK No. 8 Tahun 2015 pada tanggal 26 Juni 2015 tentang situs *website* emiten dimana perusahaan diwajibkan melakukan pengungkapan dalam situs *web* perusahaan yang memuat 4 hal yaitu (1) informasi umum emiten, (2) informasi bagi investor, (3) informasi tata kelola perusahaan, dan (4) informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi ini efektif diberlakukan mulai 02 Januari 2016 yang bertujuan terhadap peningkatan transparansi perusahaan dan peningkatan akses para *stakeholders* dan *shareholders* atas informasi emiten guna mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dafitra & Alvia, 2023) menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya POJK No 8 Tahun 2015, perusahaan yang memiliki *website* terus meningkat dari 401 perusahaan menjadi 803 perusahaan. Namun, peningkatan jumlah *website* perusahaan tidak sejalan dengan peningkatan pengungkapan informasi korporasi berbasis *website*. Penelitian (Dafitra, 2022) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* masih rendah yaitu hanya 46% dari maksimal pengungkapan 100%. Penelitian (Widari & Saifi, 2018) juga menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan internet perusahaan manufaktur di Indonesia pada komponen *content* memiliki nilai rendah dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura, serta perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh fasilitas yang tersedia di situs *website* (Almilia, 2009). Di sisi lain, POJK No. 8 Tahun 2015 memiliki sifat pengungkapan wajib, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI harus mengungkapkan informasi korporasi pada situs *web* mereka sesuai dengan yang disyaratkan. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap POJK No 8 Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penalti, dibatasinya aktivitas bisnis, suspensi bisnis, penarikan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran usaha.

Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) memberikan manfaat untuk perusahaan pada kinerja pasar perusahaan (Dafitra & Alvia, 2023), meminimalisir terjadinya asimetri informasi (Sadalia et al., 2017) dan dapat menarik banyak investor (Handayani, 2018). Namun, fakta di lapangan, perusahaan di Indonesia belum maksimal dalam melakukan pengungkapan informasi pada situ *web*. Hal ini menimbulkan dugaan, mungkin perusahaan sengaja tidak mengungkapkan banyak informasi ke dalam situs *web* mereka karena perusahaan berusaha menghindari biaya politik yang akan muncul seperti pajak. Dugaan ini muncul karena Indonesia menempati posisi keempat se-Asia yang melakukan perilaku *tax avoidance* setelah China, India, dan Jepang (Cobham et al., 2020). Berdasar pada dokumen *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, sekitar 4,78 miliar dollar AS atau Rp67,6 triliun kerugian yang dialami Indonesia berasal dari perilaku *tax avoidance* perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Awaliah et al., 2022) memperlihatkan bahwa terdapat tingkat perilaku *tax avoidance* yang tinggi pada emiten yang tercatat di BEI tahun 2018 hingga 2020 serta terlihat sektor *property* dan *real estate* mendominasi perilaku *tax avoidance* ini.

Dugaan rendahnya pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* diperkuat oleh hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) yang menjelaskan jika kemungkinan entitas bisnis akan mengalami transfer sumber daya kas dalam proses politik, maka perusahaan akan mencari dan menggunakan kebijakan akuntansi yang meminimalisir terjadinya transfer tersebut (Setyorini & Ishak, 2012). Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan tidak mengungkapkan banyak informasi kepada pihak luar. Penelitian yang dilakukan oleh (Li & Ma, 2018; Kerr, 2019; Krismona & Kristanto, 2020) menemukan bahwa transparansi perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan *go public* di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Menurut (Watts & Zimmerman, 1978) hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) menjelaskan bahwa entitas bisnis sangat rentan terhadap redistribusi kekayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan manajemen perusahaan menghindari hal tersebut dengan melakukan berbagai cara seperti melaksanakan kampanye tanggung jawab sosial, melakukan lobi pemerintah, dan menggunakan metode akuntansi yang berpotensi meminimalkan laba yang dilaporkan. Menurut (Setyorini & Ishak, 2012) hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) menjelaskan jika kemungkinan besar entitas bisnis akan mengalami transfer sumber daya kas dalam proses politik, maka entitas bisnis akan mencari dan menerapkan kebijakan akuntansi yang meminimalisir terjadinya transfer tersebut. Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan alasan perusahaan memilih dan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu untuk menghindari biaya politik berupa pajak dengan cara meminimalkan pajak yang disetorkan kepada pemerintah agar perusahaan mampu mengoptimalkan laba yang telah mereka peroleh setelah pajak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2015

POJK No. 8 Tahun 2015 tentang situs *web* emiten atau perusahaan publik diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015 dan berlaku sejak 2 Januari 2016. Dalam POJK No. 8 Tahun 2015, situs *web* perusahaan wajib mencantumkan informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik

yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini sehingga dapat terciptanya perusahaan yang transparan sebagai bentuk pengimplementasian prinsip *good corporate governance* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Informasi yang wajib diungkapkan dalam situs *website* perusahaan berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2015 meliputi informasi umum emiten, informasi bagi investor, informasi tata kelola perusahaan, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW)

Menurut (Hayati & Suprayogi, 2018) pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* merupakan mekanisme penyampaian informasi yang digunakan entitas bisnis, baik informasi keuangan maupun non-keuangan melalui *website* resmi perusahaan. Menurut Kieso et al (2019) dalam (Insani et al., 2024) pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* merupakan cara yang dapat diterapkan agar hubungan antara perusahaan, investor, analis, pemegang saham, maupun *stakeholders* lainnya dapat terjalin dengan baik melalui penyajian informasi keuangan dalam laman *website* perusahaan.

Dalam penelitian ini, Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) diproses dengan indeks yang dikembangkan oleh (Alvia et al., 2024), indeks tersebut mengacu pada item-item yang harus diungkapkan perusahaan berdasarkan item yang tercantum dalam POJK No. 8 tahun 2015 yang berjumlah 31 item. Penilaian TPIKBW dilakukan dengan metode skor, yang mana setiap item yang tercantum dalam *website* entitas bisnis diberi skor 1 (satu) dan 0 (nol) bila perusahaan tidak mengungkapkan item informasi dalam *website* perusahaan. Kemudian, Indeks pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* dihitung dengan membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah perilaku entitas bisnis guna mempertahankan sumber daya kas dalam perusahaan yang semestinya dikeluarkan untuk pemerintah (Wang et al., 2020). Menurut (Kirchler et al., 2003) *tax avoidance* merupakan upaya untuk mengecilkan kewajiban pajak yang disetor oleh perusahaan melalui cara-cara yang sah dan legal. Di mata hukum, *tax avoidance* merupakan kegiatan legal karena sebagai bagian dari *tax planning*, namun perilaku ini tidak disukai oleh pemerintah (Oktavia et al., 2020) karena dapat menurunkan pendapatan negara. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproses dengan *Effective Tax Rate* (ETR) dimana total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak (Hanlon et al., 2010).

HIPOTESIS

Pengaruh tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* (TPIKBW) terhadap perilaku *tax avoidance*

Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) ingin melihat seberapa transparan perusahaan menyajikan informasinya kepada *stakeholders* dan *shareholders*. Ketika tingkat transparansi perusahaan tinggi dalam operasi bisnisnya, maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya perilaku *tax avoidance* (Krismona & Kristanto, 2020). Menurut (Li & Ma, 2018) ketika perusahaan lebih banyak terlibat dalam aktivitas *tax avoidance*, maka manajer akan mengaburkan aktivitas-aktivitas bisnis mereka guna mengurangi pengawasan dari otoritas pajak. (Kharisma & Faisol, 2019) mengungkapkan bahwa semakin tinggi transparansi perusahaan maka akan menurunkan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: TPIKBW memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan 2 (dua) tahap metode. Tahap pertama, penelitian ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* dengan cara mengidentifikasi item pengungkapan informasi korporasi pada laman *website* perusahaan sesuai POJK No. 8 Tahun 2015. Pada tahap kedua, data indeks analisis konten pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* digunakan untuk mengukur perilaku *tax avoidance* perusahaan *go public* di Indonesia. Metode yang dipakai untuk melihat pengaruh TPIKBW terhadap *tax avoidance* yaitu metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Juni 2024 dan halaman *website* seluruh perusahaan yang diakses pada 1 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024.

Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2024. Dengan demikian, diperoleh total populasi sebanyak 830 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteri Sampel	Jumlah
1	Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2024	830
2	Perusahaan tidak memiliki <i>website</i> pada Juni 2024	(50)
3	Perusahaan yang memiliki situs <i>web</i> namun tidak dapat diakses pada Juni 2024	(19)
4	Delisting	(16)
5	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan triwulanan di laman <i>website</i> dan tidak memiliki data yang diperlukan dalam penelitian	(262)
Data Outlier		84
Total Sampel		399

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPIKBW	399	3,00	100,00	57,5797	20,86996
TA	399	0,00	384,41	1,0355	17,48927

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Variabel independen TPIKBW menunjukkan rata-rata Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* (TPIKBW) untuk tahun 2024 pada 399 *website* perusahaan adalah 57,5797. Nilai minimum yang diperoleh dari TPIKBW tersebut adalah 3,00. Sedangkan, nilai maksimum dan standar deviasi pengungkapan informasi korporasi adalah 100,00 dan 20,86996. Sedangkan variabel dependen yaitu *tax avoidance* menunjukkan rata-rata 1,0355. Nilai minimum yang diperoleh dari *tax avoidance* tersebut adalah 3,00. Sedangkan, nilai maksimum dan standar deviasi pengungkapan informasi korporasi adalah 100,00 dan 20,86996.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		399
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,44530161
Most Extreme Differences	Absolute	0,097
	Positive	0,086
	Negative	-0,097
Test Statistic		0,097
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,000

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Mengacu tabel di atas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Karena angka tersebut kurang dari 0,05, dapat diartikan bahwasanya data pada model yang diterapkan tidak terdistribusi normal. Menurut Dielman (1961) dalam (Yusmaniarti et al., 2020) menyatakan bahwa sampel yang memiliki lebih dari 30 data dianggap memiliki distribusi normal. Oleh karena itu, karena jumlah data yang digunakan adalah 399, meskipun distribusinya tidak normal, dengan merujuk pada asumsi *Central Limit Theorem* dimana data lebih dari 30 sehingga data pada penelitian ini dianggap berdistribusi normal.

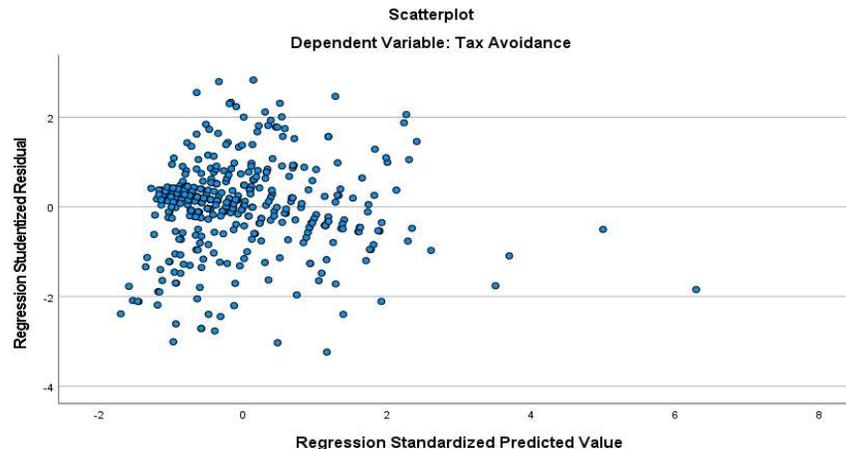
Uji Multikolinearitas**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TPIKBW	1,000	1,000

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Dari tabel di atas, nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) yang ditunjukkan kurang dari 10. Oleh karena itu, hasil uji menunjukkan bahwasanya penggunaan variabel independen penelitian ini tidak terpapar masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar di atas, memperlihatkan penyebaran titik data tidak beraturan dan tidak ada pola khusus. Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,287 ^a	0,082	0,080	0,44586	2,007

a. Predictors: (Constant), TPIKBW

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Merujuk tabel di atas, nilai Durbin Watson yaitu 2,007. Sementara itu, nilai d_U dengan total variabel bebas (k) sebesar 1 serta total sampel (N) sebanyak 399 pada tingkat signifikansi 5% adalah 1,830 yaitu $1,830 < 2,007 < (2,169)$. Dengan demikian, terdeteksi nilai *Durbin Watson* berada dalam rentang antara d_U dan $4-d_U$. Hal ini mengindikasikan tidak ada gejala autokorelasi pada model yang diuji.

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)****Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,287 ^a	0,082	0,080	0,44586

a. Predictors: (Constant), TPIKBW

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Merujuk Tabel 4.10 memperlihatkan bahwasanya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,080 yaitu setara dengan 8%. Hal ini menandakan variabel independen pada penelitian ini, yakni TPIKBW (X) berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* (Y) sebesar 8%. Sementara itu, sekitar 92% sisanya diterangkan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini.

Uji Statistik t**Tabel 7. Hasil Uji Statistik t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Hasil
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0,366	0,196		-1,865	0,063	
	TPIKBW	-0,290	0,049	-0,287	-5,959	0,000	H1 Terdukung

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2025)

Merujuk Tabel 4.11 tampak bahwasanya variabel TPIKBW (X) memiliki pengaruh negatif pada variabel *tax avoidance* (Y). Hal ini bisa dilihat dari tingkat signifikansi pada hasil uji t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *website* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Nilai koefisien variabel TPIKBW menunjukkan angka -0,290 yang berarti setiap kenaikan 1 satuan pada TPIKBW akan mengakibatkan penurunan *tax avoidance* sebesar -0,290.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website Terhadap Perilaku Tax Avoidance Perusahaan

Berdasarkan hasil uji regresi linear menunjukkan nilai koefisien variabel TPIKBW yaitu -0,290 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien -0,290 mengindikasikan adanya pengaruh negatif, yang diartikan bahwa TPIKBW berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka temuan penelitian ini menyatakan bahwa H1 diterima. Bagi beberapa perusahaan, mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi kepada publik melalui situs *website* resmi mereka karena tidak ingin menarik perhatian regulator. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan cenderung membatasi informasi yang tersedia bagi investor sebagai strategi untuk mengurangi pengawasan dari otoritas pajak (Li & Ma, 2018) sehingga memungkinkan perusahaan dapat menekan kewajiban pajak mereka melalui perilaku *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) yang menjelaskan jika entitas bisnis memiliki potensi tinggi untuk kehilangan sumber daya kas akibat proses politik, maka perusahaan akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan risiko transfer sumber daya tersebut (Setyorini & Ishak, 2012). Salah satu kebijakan yang sering diterapkan adalah membatasi tingkat transparansi dalam pengungkapan informasi kepada publik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma & Faisol, 2019; Kerr, 2019; dan Li & Ma, 2018). Namun, bertentangan dengan hasil penelitian (Razali & Ferawati, 2019) dan (Krismona & Kristanto, 2020) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil uji yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan yang berarti bahwa ketika tingkat transparansi perusahaan tinggi akan menurunkan perilaku *tax avoidance* perusahaan *go public* di Indonesia sehingga *political cost hypothesis* nya akan rendah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan supaya menambah total sampel penelitian serta memperpanjang periode pengamatan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur *tax avoidance* untuk meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel baru atau menambahkan variabel penelitian sebagai keterbaruan sehingga dapat menggali lebih dalam faktor apa saja yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Almilia, L. S. (2009). Analisa komparasi indeks internet financial reporting pada. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2009(Snati).
- Alvia, L., Susilowati, R. Y. N., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengungkapan informasi berbasis web pada perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (Sebuah studi analisis konten atas implementasi POJK No. 8 Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) melalui analisis tingkat effective tax rate (ETR) perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The state of tax justice 2020: Tax justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Dafitra, V. R. (2022). Analisis tingkat ketaatan emiten dalam mengungkapkan informasi korporasi berbasis website dan dampak terhadap kinerja pasar pada perusahaan go public di Indonesia (Sebuah evaluasi kritis pasca penerapan POJK No 8 Tahun 2015). Universitas Lampung.
- Dafitra, V. R., & Alvia, L. (2023). Analysis of compliance level of issuers in disclosing corporate information based on website post implementation of POJK No 8 of 2015. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(7), 567–573. <https://doi.org/10.55248/gengpi.4.723.48408>
- Handayani, E. (2018). Internet financial reporting: Studi komparasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Hanlon, M., Heitzman, S., Mills, L., Omer, T., Rego, S., Shackelford, D., Shevlin, T., Slemrod, J., Smith, C., Weber, D., Wilson, R., Zimmerman, J., & Zodrow, G. (2010). A review of tax research. *A Review of Tax Research*.
- Hayati, P., & Suprayogi, N. (2018). Analisis perbandingan internet financial reporting index bank umum syariah di Indonesia, Malaysia, Iran, dan Sudan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10064>
- Insani, A. D. S., Gustati, G., & Ihsan, H. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, dan leverage terhadap pengungkapan internet financial reporting. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 474. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1503>
- Kerr, J. N. (2019). Transparency, information shocks, and tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 36(2). <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12449>
- Kharisma, M., & Faisol, D. A. (2019). Effect of corporate social responsibility and company transparency on tax avoidance with profitability as moderating variables (In manufacturing companies that are listing on the IDX 2015-2017 period). *Scholar Bulletin*, 9771, 439–443. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.8.5>
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Krismona, & Kristanto, A. B. (2020). Transparansi dan nilai perusahaan: Efek mediasi penghindaran pajak. *FINANSIA*, 03.
- Li, C., & Ma, M. (2018). Institutional knowledge at Singapore Management University: How does tax avoidance affect transparency? *How Does Tax Avoidance Affect Corporate Transparency?*
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. Wijaya. (2020). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- POJK No. 8/POJK.04/. (2015). Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–11. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/Peraturan-OJK-Nomor-8-POJK-04-2015-tentang-Situs-Web-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>
- Razali, R., & Ferawati, F. (2019). Kepemilikan institusional dan transparansi informasi terhadap penghindaran pajak: Sebelum, saat, dan setelah tax amnesty. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 74–88. <https://doi.org/10.36423/jumper.v1i2.250>
- Sadalia, I., Rahamani, N. A. B., & Muda, I. (2017). The significance of internet-based financial information disclosure on corporates' shares in Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 337–346.

- Setyorini, C. T., & Ishak, Z. (2012). Corporate social and environmental disclosure: A positive accounting theory viewpoint. *International Journal of Business and Social Science*, 3(9), 152–164.
- Sivitas. (n.d.). Siaran pers No. 80/HM/KOMINFO/01/2024 tentang pengguna internet meningkat, Kominfo galang kolaborasi tingkatkan kualitas layanan. Kominfo. Retrieved September 20, 2024, from <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-80-hm-kominfo-01-2024-tentang-pengguna-internet-meningkat-kominfo-galang-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-layanan>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*.
- Widari, P. P., & Saifi, F. N. M. (2018). Analisis internet financial reporting. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Yusmaniarti, Oktavia, N. A., & Setiorini, H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, 5, 67–87.